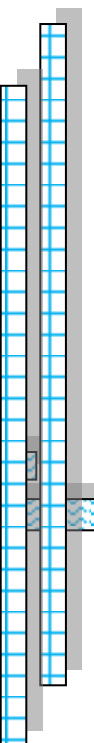


# PROFIL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG



**PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2016-2017**



## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah di bidang pekerjaan umum, terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari pemerintah pusat untuk kegiatan yang bersifat fisik. Sebagaimana telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diatur sebagai berikut :

Urusan pekerjaan umum, merupakan urusan wajib pemerintah daerah yang terdiri dari sub bidang sumber daya air, bina marga, cipta karya (perkotaan dan perdesaan), air minum, air limbah, persampahan, drainase, permukiman, bangunan gedung dan lingkungan dan jasa konstruksi. Urusan wajib melekat dalam skala kabupaten/kota.

Tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya.

Tugas Pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pembangunan kawasan permukiman, bina konstruksi, penataan ruang dan peralatan dan pengujian mutu.

Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pelaksana jaringan pemanfaatan air, jasa konstruksi, penataan ruang dan preservasi jalan jembatan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelaksana jaringan sumber air, pembangunan jalan dan jembatan, pelaksana jaringan pemanfaatan air, jasa konstruksi, penataan ruang dan preservasi jalan jembatan;
- c. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan umum;
- d. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan, preservasi dan pembangunan jalan;
- e. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian evaluasi perencanaan dan pengawasan dalam bidang pengelolaan sumber daya air;
- f. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
- g. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Untuk menjalankan fungsi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya didukung oleh 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 6 (enam) Bidang, 18 (delapan belas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian, lebih jelasnya terlihat pada bagan struktur organisasi di bawah ini.



## **BAB II**

### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2017-2018, adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam, merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Lima tahun sebelumnya Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangka Raya telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pembangunan daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa mendatang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

## Permasalahan pembangunan jalan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pasal 9 Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa.

Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antara pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

Sesuai Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/485 TAHUN 2014, ruas jalan di Kota Palangka Raya sebanyak 948 ruas dengan panjang 911,83 Km, untuk jalan lingkungan termasuk jalan titian yang ada dalam Kota Palangka Raya sepanjang 500 Km.

Permasalahan dalam pembangunan jalan disebabkan antara lain yaitu :

1. Sebaran penduduk yang tidak merata sehingga mempengaruhi kondisi geografis penanganan jalan
2. Kondisi tanah dasar yang ada di Kota Palangka Raya memerlukan penanganan yang lebih kompleks, sehingga membutuhkan biaya yang besar untuk mencapai kondisi jalan yang mantap.
3. Sumber material yang ada di Kota Palangka Raya sangat terbatas, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah.

Tabel 1  
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan  
Kondisi Kota Palangka Raya Tahun 2013-2016

No	Kondisi Jalan	Panjang Jalan (Km)			
		2013	2014	2015	2016
1	Baik	104,016	122,26	180,058	206,028
2	Sedang	141,555	135,68	276,505	285,63
3	Rusak Ringan	259,567	404,81	241,347	213,902
4	Rusak Berat	406,692	249,09	213,92	204,27

## Permasalahan Jaringan Irigasi

Seperti diketahui bersama, bahwa jaringan irigasi terdiri dari saluran irigasi dan bangunan pelengkap. Selanjutnya, saluran irigasi dibagi menjadi tiga jenis yaitu saluran primer, saluran sekunder, dan saluran tersier.

Pemerintah Kota Palangka Raya, sesuai dengan kewenangannya, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya berwenang mengelola saluran primer dan sekunder dalam satu kabutapen/ kota yang luasnya kurang dari 1000 Ha. Data tentang kondisi saluran sekunder untuk kepentingan irigasi yang terdapat di Kota Palangka Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2  
Jaringan Irigasi Kota Palangka Raya Tahun 2013-2016

No	Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan			
		2013	2014	2015	2016
1	Jaringan Sekunder	70.949	70.949		
2	Luas lahan budidaya	3.115	3.115		
3	Rasio	27,43	27,43		

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa panjang jaringan saluran sekunder dari tahun ke tahun berikutnya terus meningkat, demikian juga luas lahan budi daya dan rasionya juga semakin meningkat. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat permasalahan yang ditemukan di lapangan, antara lain :

1. Pada titik-titik tertentu, saluran sekunder belum dilengkapi bangunan pelengkap, seperti pintu air atau tabat, sehingga pengelolaan air menjadi belum optimal, dan berdampak pada kelebihan air pada saat musim hujan dan kekurangan air pada musim kemarau.
2. Jaringan saluran sekunder belum semuanya terhubung dengan jaringan saluran primer atau sungai, sehingga pada musim hujan terjadi banjir pada bagian hilir saluran sekunder dan sekitarnya.

3. Sebagian jaringan saluran sekunder dan primer kapasitas pengalirannya semakin mengecil akibat sedimentasi, tumbuhnya rerumputan dan semak belukar.

Dilihat per kecamatan, maka kecamatan yang sangat rendah jaringan irigasinya adalah wilayah Pahandut dan Jekan Raya dan wilayah dengan jaringan cukup panjang adalah wilayah Bukit Batu dan Sabangau, dikarenakan daerah tersebut merupakan sentra pertanian.

Tabel 3  
Rasio Jaringan Irigasi Menurut Kecamatan  
Kota Palangka Raya Tahun 2016

No	Kecamatan	Panjang Jaringan Irigasi			Total Panjang Jaringan Irigasi (Meter)	Luas Lahan Budidaya (Ha)	Rasio
		Primer (Meter)	Sekunder (Meter)	Tersier (Meter)			
1	Sabangau	19.680	10.094		29.774	1.451,5	20,513
2	Pahandut	10.132	6.732		18.864	195	96,738
3	Jekan Raya	14.447	16.343		30.790	205	150,2
4	Bukit Batu	7.614	20.149		27.763	565	49,138
5	Rakumpit	3.988	1.531		5.519	220	25,086
T O T A L		55.861	56.849		112.710	2.636,5	42,75

### Permasalahan Drainase

Penduduk Kota Palangka Raya dari tahun ke tahun terus meningkat. Pertambahan penduduk ini membutuhkan tempat permukiman yang semakin luas. Alih fungsi lahan menjadi kawasan permukiman akan berkontribusi pada semakin kecilnya kawasan resapan di satu sisi, dan disisi lain berkontribusi pada semakin besarnya debit aliran permukaan. Kondisi ini akan menimbulkan banjir, khususnya pada kawasan yang belum dilengkapi sistem drainase atau pada kawasan permukiman yang kondisi sistem drainasenya tidak fungsional.

Di wilayah Kota Palangka Raya, sistem drainase yang sudah terbangun, antara lain berupa jaringan saluran beserta gorong-gorong. Jaringan saluran



drainase yang sudah terbangun terdiri dari saluran primer, sekunder, dan tersier. Walaupun sistem drainase sudah terbangun, pada beberapa kawasan dan titik-titik tertentu masih terjadi banjir yang cukup mengganggu aktivitas warga serta keindahan kota. Ini artinya masih terdapat permasalahan sistem drainase di wilayah Kota Palangka Raya. Permasalahan itu, antara lain :

1. Belum terbangunnya sistem drainase pada kawasan-kawasan tertentu dan kurang terpeliharanya bangunan drainase yang ada.
2. Masih terdapat saluran drainase yang terputus atau tidak terhubung dengan saluran lainnya sehingga aliran menjadi tidak kontinyu. Misalnya: saluran tersier tidak terhubung atau tidak bermuara ke saluran sekunder, dan saluran sekunder tidak terhubung atau tidak bermuara ke saluran primer.
3. Masih terdapat saluran drainase yang memerlukan gorong-gorong untuk melintaskan air ke saluran berikutnya.
4. Kapasitas pengaliran saluran drainase/ gorong-gorong semakin mengecil akibat sedimentasi, tumbuhnya rerumputan dan semak belukar serta tumpukan sampah.
5. Ada kecenderungan saluran drainase ditutup pada bagian atasnya serta tidak dilengkapi dengan *inlet*/ lubang pemasukan air, sehingga air tidak dapat masuk ke saluran dan akhirnya menimbulkan genangan.

Tabel 4  
Jaringan Drainase Kota Palangka Raya Tahun 2013-2016

No	Kota	Panjang Jaringan (Km)			
		2013	2014	2015	2016
1	Palangka Raya	1.542,14	1.642,14	1.655,63	1.680,38



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi SKPD**

##### **4.1.1. Visi**

Visi Pembangunan Kota Palangka Raya adalah “Terwujudnya Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Pariwisata yang Berwawasan Lingkungan Berdasarkan Falsafah Budaya Betang”.

##### **4.1.2 Misi**

Dalam usaha mewujudkan visi, maka ditetapkanlah Misi Pembangunan Kota Palangka Raya yaitu : Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana publik yang berkualitas berdasarkan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

#### **Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target Kinerja</b>
1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik	55 %
		Panjang jalan dilalui roda 4	5 Km
		Panjang jalan kota dalam kondisi baik	311 Km
		Jumlah jembatan	1 Buah
		Rasio kerusakan jalan per tahun	0,44
		Luas irigasi kota dalam kondisi baik	3.950 Ha
		Drainase dalam kondisi baik	1.704,14 Km
		Panjang pengendali banjir kondisi baik	41 Km
		Jumlah dokumen survey	1 Dokumen

#### 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Data Awal Kinerja	Target Capaian Setiap Tahun	
			2016	2017	2018
Meningkatkan ketersediaan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik (%)	53,92	55	58
		Panjang jalan dilalui roda 4 (km)	5,3	10	15
		Panjang jalan kota dalam kondisi baik (km)	491,658	311	316
		Jumlah jembatan (buah)	2	1	1
		Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung	0	150	200

		dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota (m2)			
		Rasio kerusakan jalan per tahun	0,45	0,44	0,42
		Luas irigasi kota dalam kondisi baik (ha)	4.023	3.950	4.750
		Drainase dalam kondisi baik (km)	1.680,38	1.704,14	1.729,14
		Panjang pengendali banjir kondisi baik (Km)	33,30	41	50

### 4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah SKPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan SKPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik,

termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi adalah suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam dua tahun mendatang, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2  
Rumusan Pernyataan Strategi dan Kebijakan SKPD Dalam Dua Tahun Mendatang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program
Meningkatkan ketersediaan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya pembangunan infrastruktur	Memenuhi kebutuhan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat berbasis pariwisata, gender, anak dan jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur</li> <li>• Pembangunan jalan dan jembatan</li> <li>• Pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong</li> <li>• Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>• Pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan</li> <li>• Pengendalian banjir</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan Jalan dan Jembatan</li> <li>• Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong</li> <li>• Pembangunan Drainase dan Gorong-Gorong</li> <li>• Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan</li> <li>• Pengembangan dan pengelolaan irigasi, rawa dan jaringan pengairan</li> <li>• Pengendalian banjir</li> </ul>

## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu per SKPD sebagaimana tercantum dalam rancangan awal RPJMD, selanjutnya dijabarkan SKPD kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD.

Kelompok sasaran adalah pihak yang menerima manfaat langsung dari jenis layanan SKPD. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, harus dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.

Program-Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya Tahun 2017 -2018 yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
7. Program Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-gorong
8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
10. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
11. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
12. Program Pengendalian Banjir



13. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
14. Program Perencanaan Tata Ruang
15. Program Lingkungan Sehat Permukiman

Adapun rencana kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 5.1.

